

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

Pada landasan teori dalam penelitian ini akan dijabarkan mengenai, teori legitimasi, latar belakang dan faktor pendorong tanggungjawab lingkungan hidup, definisi pengungkapan, *environmental disclosure*, dan *corporate governance*.

##### **1. Teori Legitimasi**

Teori Legitimasi menekankan bahwa ada kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi (Ghozali dan Chariri, 2007). Berdasarkan hal tersebut, maka merupakan tanggung jawab organisasi untuk melaporkan dampak total terhadap masyarakat luas. “Kontrak sosial” tidak mudah didefinisikan tetapi konsepnya telah digunakan untuk merepresentasikan banyak pengharapan secara implisit dan eksplisit dari masyarakat tentang bagaimana organisasi seharusnya bersikap terhadap operasinya. Menurut teori ini, kelangsungan hidup organisasi selama ini berasal dari kekuatan pasar dan harapan masyarakat (Rahmi, 2014).

Teori legitimasi mengatakan bahwa organisasi secara terus menerus mencoba untuk meyakinkan bahwa mereka melakukan

kegiatan sesuai dengan batasan dan norma- norma masyarakat dimana mereka berada.

## **2. Latar Belakang dan Faktor Pendorong Tanggung Jawab Lingkungan Hidup**

Dekade 1960-an dipandang sebagai kebangkitan aktivitas lingkungan hidup, pada masa ini, orang-orang menjadi lebih peduli kepada kelestarian lingkungan hidup. Dampak industry terhadap kualitas air, dan tanah menjadi sorotan masyarakat. Peraturan pemerintah untuk melindungi sumber daya dan mengawasi pelepasan limbah berbahaya. Berbagai standar ditetapkan untuk mengawasi operasi dan usaha. Banyak perusahaan industri dan jasa berskala besar di dunia yang kini menerapkan akuntansi lingkungan. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dengan melakukan penilaian kegiatan lingkungan dari sudut pandang biaya (*environmental disclosure*) dan manfaat atau efek (*economic benefit*).

Menurut Gray dan Lavers dalam Novita, (2009) latar belakang perlunya pengungkapan informasi sosial dan lingkungan hidup adalah

- a) Munculnya masalah-masalah sosial lingkungan perusahaan karena ketidakpuasan terhadap kebijakan masyarakat sosial.
- b) Untuk meminimalisasi munculnya perusahaan terhadap lingkungan sosial dan dengan menggunakan salah satu media yang bisa digunakan untuk mengungkapkan sosial adalah laporan tahunan.

### 3. *Environmental Disclosure*

Akuntansi sebagai alat pertanggungjawaban mempunyai fungsi sebagai alat kendali utama terhadap aktifitas perusahaan. Tanggung jawab manajemen tidak terbatas pada pengelola dana ke dalam perusahaan kepada investor dan kreditor, tetapi juga meliputi dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan terhadap lingkungan (Novita, 2009).

*Environmental disclosure* adalah pengungkapan informasi di dalam laporan tahunan perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan hidup (Suratno dkk, 2006). Pelaporan lingkungan hidup meliputi pengendalian terhadap polusi, pencegahan atau perbaikan terhadap kerusakan lingkungan, konservasi alam dan pengungkapan lain yang berhubungan dengan lingkungan (Zhegal dan Ahmed, 1990). Pengungkapan informasi lingkungan hidup perusahaan bertujuan sebagai media untuk mengkomunikasikan realitas untuk mengambil keputusan ekonomi, sosial, dan politis (Hayuningtyas, 2007).

*Environmental disclosure* merupakan wujud pertanggung jawaban sosial perusahaan. Melalui pengungkapan lingkungan hidup pada laporan keuangan tahunan, masyarakat dapat memantau aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memenuhi tanggung jawab sosialnya. Dengan cara demikian, perusahaan akan memperoleh perhatian, kepercayaan dan dukungan dari masyarakat sehingga perusahaan dapat tetap eksis.

#### 4. *Corporate Governance*

Istilah *corporate governance* pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee*, Inggris, di tahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporannya yang kemudian dikenal sebagai *Cadbury Report*. Menurut *Cadbury Committee of United Kingdom* dalam Handayani (2011), *Corporate Governance* yaitu seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

*Corporate governance* mendorong perusahaan untuk mempromosikan etika, keadilan, transparansi dan akuntabilitas di semua hubungan mereka dan meningkatkan sebuah pengungkapan berbasis lingkungan di mana manajer adalah dipaksa untuk bertindak bagi kepentingan pemegang saham dan para *stakeholder* (Rahmi, 2014).

#### 5. *Mekanisme Corporate Governance*

Mekanisme *corporate governance* mengacu pada sekumpulan mekanisme yang mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh manajer ketika terjadi pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian. Dalam penelitian ini, mekanisme *corporate governance*

akan diproksikan dengan variabel proporsi dewan komisaris, latar belakang etnik presiden komisaris, komite audit, kepemilikan institusional, dan proporsi wanita dalam dewan komisaris.

**a. Proporsi Dewan Komisaris Independen**

Independensi dewan komisaris adalah permasalahan *corporate governance* yang paling diperdebatkan dihadapi oleh perusahaan. Komisaris independen merupakan pihak yang tidak mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris, serta dengan perusahaan itu sendiri (KNKG, 2006). Komisaris independen memiliki peran penting bagi perusahaan. Hal tersebut diterima secara luas bahwa independensi dewan komisaris dapat meningkatkan efektivitas dewan serta kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Keberadaan Komisaris Independen diharapkan dapat bersikap netral terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh direksi. Karena komisaris independen tidak terpengaruh oleh manajemen, mereka cenderung mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas kepada para *stakeholdernya* (Rahmi, 2014).

### **b. Proporsi Komite Audit Independen**

Komite audit independen menunjukkan proporsi komisaris independen dalam susunan komite audit. Menurut Abdullah dalam Handayani, (2011) komisaris independen merupakan salah satu syarat agar komite audit efektif (Handayani, 2011). Hal ini dikarenakan keberadaan komite audit dengan proporsi komisaris independen yang lebih besar dapat mengurangi biaya keagenan dan meningkatkan pengendalian internal yang akan menyebabkan kualitas pengungkapan yang lebih baik.

### **c. Kepemilikan Institusi**

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Rawi, 2008). Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. *Monitoring* tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional

sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer (Wien, 2010).

Perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi dikuasai oleh pemegang saham yang memiliki proporsi kepemilikan yang substansial sehingga memiliki kepentingan yang besar terhadap kinerja perusahaan. Kepemilikan institusi yang besar di dalam perusahaan dapat meningkatkan pengawasan kepada manajemen perusahaan. Ketatnya pengawasan tersebut meminimalkan kesalahan yang dilakukan perusahaan dan mendorong perusahaan untuk memberikan informasi yang lebih transparan (Sanjaya, 2013).

#### **d. Proporsi Wanita dalam Dewan Komisaris**

Suatu perusahaan dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya pada masa saat ini tidak lepas dari tangan para wanita. Tidak hanya pria saja yang dibutuhkan untuk memegang posisi penting dalam perusahaan seperti posisi direksi. Wanita yang dahulu sering dipandang lemah dan tidak bisa melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh pria justru pada saat ini sangat dibutuhkan di dalam suatu perusahaan.

Posisi direksi saat ini sedikit banyak sudah diperankan oleh para wanita karena wanita dinilai dapat lebih berkomitmen dalam keterlibatannya di suatu pekerjaan, lebih memiliki persiapan yang matang dibandingkan para pria dalam menghadapi

segala situasi yang mungkin terjadi, lebih rajin untuk mengajukan pertanyaan yang dapat mendukung pengambilan keputusan dan akhirnya membuat suasana yang baik di ruang rapat (Rahmi, 2014).

Kemajemukan dalam dewan komisaris menjadi hal yang umum terjadi dalam suatu dewan komisaris. Kemajemukan ini dianggap sebagian besar peneliti dapat mempengaruhi keputusan dewan komisaris untuk memutuskan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan (Sanjaya, 2013).

## 6. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dalam penelitian digunakan sebagai variabel control. *Firm size* (ukuran perusahaan) adalah skala besar kecilnya perusahaan yang ditentukan oleh beberapa hal antara lain total penjualan, total aktiva, dan rata-rata tingkat penjualan perusahaan. Semakin besar perusahaan tersebut, maka investor akan lebih mudah percaya untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Untuk tetap menjaga agar perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang sesuai dengan harapan investor maka dibutuhkan dana yang besar untuk tetap bisa mengawasi dan mengontrol perusahaan. Proses pengawasan ini dilakukan agar bisa mengendalikan konflik keagenan. Apabila terjadi konflik keagenan juga berpengaruh terhadap *agency cost* perusahaan.



Ukuran perusahaan merupakan salah satu indikator yang digunakan investor dalam menilai aset maupun kinerja perusahaan. Jika perusahaan mempunyai total aktiva dan total penjualan yang lebih besar, menunjukkan bahwa perusahaan telah mencapai tahap kedewasaan (*maturity*) dan perusahaan mempunyai prospek baik dalam jangka waktu yang relatif lama. Perusahaan yang berukuran besar dan mapan akan menjaga kepercayaan investor agar tetap menginvestasikan dananya.

Suatu perusahaan yang sudah mapan akan memiliki akses yang mudah ke pasar modal, sementara perusahaan yang baru dan masih kecil akan mengalami banyak kesulitan untuk akses ke pasar modal. Kemudahan akses ke pasar modal dapat diartikan adanya fleksibilitas dan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan dana yang lebih besar. Kemudahan mendapatkan dana dari pasar modal ini berimplikasi pada pembayaran dividen. Pembayar dividen akan mengurangi pendanaan dari sumber internal. Perusahaan tidak lagi khawatir tidak dapat memenuhi kebutuhan dananya dari sumber internal karena perusahaan dapat dengan mudah mendapatkan dana dari sumber eksternal di pasar modal.

## **7. Profitabilitas**

Profitabilitas dalam penelitian digunakan sebagai variabel control. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan *profit* atau laba selama satu tahun (Menurut Sujoko dan

Soebiantoro (2007) dalam Deitiana (2011),. Menurut Indrawati dan Sunandra (2006) dalam Deitiana (2011), profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Menurut Rahmawati et al, (2007) profitabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan perusahaan. Menurut Gitman (2009) dalam Deitiana (2011), profitabilitas adalah hubungan antara pendapatan dan biaya yang dihasilkan dengan menggunakan *asset* perusahaan, baik lancar maupun tetap, dalam aktivitas produksi. Profitabilitas menurut Saidi (2004) adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba.

Menurut Gitman (2009) dalam Deitiana (2011), terdapat banyak cara untuk mengukur profitabilitas. Berbagai pengukuran ini memungkinkan analisis untuk mengevaluasi keuntungan perusahaan dilihat baik dari sisi penjualan, *asset* ataupun investasi pemilik. Tanpa *profit*, perusahaan tidak dapat menarik sumber modal eksternal untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama satu tahun dan dikalkulasi dengan *return equity*.

Rasio profitabilitas menurut Gitman (2009) dalam Deitiana (2011) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian dari penjualan investasi serta kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang akan menjadi dasar pembagian dividen perusahaan. Rasio yang paling umum

digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah *return on asset*, *return on equity* dan *return on investment*.

Beberapa fungsi spesifik yang berkaitan dengan profitabilitas yaitu (Hampton, 1990 dalam Hapsari, 2010):

- a. Pengaturan biaya. Posisi manajer keuangan adalah memonitor dan mengukur jumlah uang yang dikeluarkan dan dianggarkan oleh perusahaan. Ketika terjadi kenaikan biaya, manajer dapat membuat rekomendasi yang diperlukan agar dapat dikendalikan.
- b. Penentuan harga. Manajer keuangan dapat mensuplai informasi mengenai harga, perubahan biaya serta *profit margin* yang diperlukan agar bisnis dapat berjalan lancar dan sukses.
- c. Memproyeksikan keuntungan. Manajer keuangan bertanggung jawab untuk mendapatkan dan menganalisis data relevan dan membuat proyeksi keuntungan perusahaan. Untuk memperkirakan keuntungan dari penjualan di masa yang akan datang, perusahaan perlu mempertimbangkan biaya saat ini serta kemungkinan kenaikan biaya dan perubahan kemampuan perusahaan untuk menjual barang pada harga yang telah ditetapkan.
- d. Mengukur keuntungan yang disyaratkan. Keuntungan yang disyaratkan harus diperkirakan dari proposal sebelum diterima. Kadang dikenal sebagai biaya modal.

## **B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis**

### **1. Pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap *Environmental Disclosure***

Peran utama dewan komisaris adalah terkait dengan fungsi (kontrol *Pound* dalam Novita, 2009). Dewan komisaris independen merupakan alat untuk mengawasi perilaku manajemen untuk meningkatkan pengungkapan informasi sukarela dalam laporan tahunan perusahaan.

Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat bersikap netral terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh direksi. Karena komisaris independen tidak terpengaruh oleh manajemen, mereka cenderung mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas kepada para *stakeholdernya* (Rahmi, 2014). Dalam penelitian Chen dan Jaggi dalam Novita, (2009) menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*.

Dengan demikian, hipotesis yang dapat diturunkan adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*

## **2. Pengaruh proporsi komite audit independen terhadap *environmental disclosure***

Komite Audit mempunyai kewenangan untuk mendapatkan catatan dan informasi tentang karyawan, dana serta sumber daya perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Dalam melaksanakan wewenang komite audit bekerja sama dengan pihak yang melaksanakan unit audit yang bertugas memberikan pendapat terhadap laporan yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan dewan komisaris. Dalam hubungan kerja, komite audit mempunyai hubungan kerja langsung dan bertanggung jawab kepada komisaris serta hubungan kerja tidak langsung dengan unit audit internal perseroan.

Peran komite audit adalah menyediakan suatu arti untuk mengkaji proses perusahaan dalam menghasilkan data keuangan dan pengendalian internal perusahaan. Oleh karena itu, keberadaan komite audit diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan (Said *et al.*, dalam Handayani, 2011). Berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor IX.I.5 Tahun 2004, dewan komisaris harus membentuk komite audit dengan setidaknya satu orang komisaris independen atau lebih. Keberadaan komite audit dengan proporsi komisaris independen yang lebih tinggi akan mengurangi biaya

keagenan dan meningkatkan pengendalian internal yang akan mengakibatkan kualitas pengungkapan yang lebih tinggi (Forker dalam Handayani, 2011). Hasil penelitian Simon (2001) membuktikan bahwa proporsi anggota independen dalam komite audit berpengaruh positif terhadap luasnya *disclosure*.

Dengan demikian, hipotesis yang dapat diturunkan adalah sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Proporsi komite audit independen berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*.

### **3. Pengaruh kepemilikan institusi terhadap *environmental disclosure***

Kepemilikan institusional merupakan salah satu bentuk kepemilikan terkonsentrasi dan diukur dengan presentasi saham yang dimiliki oleh pemegang saham besar dan / atau kelembagaan. Kepemilikan institusional adalah kolektor besar tabungan dan pemasok dana ke pasar keuangan seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan investasi dan lain-lain.

Sanjaya (2013) berpendapat aktivitas monitoring yang dilakukan oleh investor institusi dapat memaksa manajemen untuk mengungkapkan informasi sosialnya. Sehingga makin besar kepemilikan institusi dalam perusahaan akan meningkatkan pula kinerja ataupun pengungkapan lingkungan yang merupakan bagian dari

tindakan social yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk transparansi informasi untuk *stakeholder*.

Semakin besar kepemilikan institusi dalam perusahaan akan meningkatkan pengungkapan lingkungan yang merupakan bagian dari tindakan sosial yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk transparansi informasi untuk *stakeholder*, karena perusahaan mengungkapkan informasi yang lebih banyak dalam upaya memiliki sistem informasi sosial yang lebih baik, cenderung memiliki sumber daya untuk menghasilkan lebih banyak informasi, dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki keterbatasan dalam sistem informasi pelaporan. Penelitian Sanjaya (2013) dan Fajriah (2014) membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan lingkungan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat diturunkan adalah sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Kepemilikan institusi berpengaruh positif terhadap *Environmental Disclosure*.

#### **4. Pengaruh proporsi wanita dalam dewan komisaris terhadap *Environmental Disclosure***

Tingkat keanekaragaman di perusahaan dapat mempengaruhi keputusan dan aktivitas mereka. Dengan adanya peningkatan perbedaan gender tersebut dapat di lihat bahwa perempuan dapat membuat kontribusi yang signifikan terhadap perusahaan. Perusahaan

dengan jumlah perempuan pada manajemen level atas yang lebih banyak merupakan perusahaan yang secara organisasi dan kinerja keuangan yang lebih baik dalam pengungkapan dan pelaporan perusahaan. Di sisi lain juga dapat mengurangi efektifitas dewan komisaris karena meningkatnya perbedaan dan menghambat kemampuan dewan untuk bertindak. Strategi untuk meningkatkan perempuan hadir dalam kursi kepemimpinan yaitu: meningkatkan kehadiran perempuan dalam kursi kepemimpinan, mengembangkan keahlian kepemimpinan global dari perempuan senior dan berbakat dan meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mendukung karir dan kesuksesan perempuan berbakat.

Adams dan Ferreira dalam Rahmi, (2014) menemukan bahwa lebih banyak wanita dalam perusahaan dapat meningkatkan proses pembuatan keputusan, meningkatkan efektivitas perusahaan dan bahwa wanita memiliki kehadiran/partisipasi lebih baik. Selain kinerja perusahaan yang memiliki lebih banyak direksi wanita pada perusahaan juga dapat memberikan efek positif pada pengungkapan, keuangan dan non keuangan. Menurut Ibrahim dan Angelidis dalam Rahmi (2014) direktur wanita menunjukkan tanggung jawab besar, dalam analisa mereka, mereka menemukan bahwa wanita lebih didorong kedermawanannya dan kurang peduli dengan kinerja ekonomi. Argumentasi lain yang mendukung memiliki lebih banyak direksi wanita adalah bahwa mereka mampu meningkatkan



independensi perusahaan dan faktor penting yang meningkatkan akuntabilitas, dan memiliki potensi untuk meningkatkan tingkat pengungkapan (Rahmi, 2014).

Dengan demikian, hipotesis yang dapat diturunkan adalah sebagai berikut:

H<sub>4</sub>: Proporsi wanita dalam dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*

### C. Model Penelitian

Model Penelitian ini menggambarkan pengaruh proporsi dewan komisaris independen, latar belakang *ethnic* presiden komisaris, proporsi komite audit independen, *institutional ownership*, proporsi wanita dalam dewan komisaris terhadap *environmental disclosure* dengan bentuk model sebagai berikut:

